

**EVALUASI *E-BUDGETING* DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**(TAHUN ANGGARAN 2018)**

**Wahyuningsih**  
**wahyuninyugi@gmail.com**  
**Departemen Politik dan Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang**

**ABSTRAK**

Pemerintah Kota Surakarta menerapkan *E-Budgeting* melalui implementasi SIMDA Keuangan. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta juga menerapkan layanan website transparansi anggaran. Hasil dalam pengelolaan keuangan yang baik ditunjukkan dengan pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi *E-Budgeting* melalui peran birokrasi di Pemerintah Kota Surakarta dan modal sosial yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang dari perwakilan Bappeda, BPPKAD, Diskominfo SP dan Pattiro Kota Surakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *E-Budgeting* menggunakan SIMDA Keuangan sebagai alat untuk membantu pengelolaan keuangan daerah telah mampu memfasilitasi tahap penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban secara terintegrasi dan akuntabel. Layanan website transparansi anggaran perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk mendukung transparansi. Hubungan peran birokrasi dalam penerapan *E-Budgeting* ditunjukkan melalui *Compliance* Pemerintah Kota Surakarta berupa kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah. Namun, saat ini belum ada peraturan khusus tentang *E-Budgeting*. Pemerintah Kota Surakarta masih dalam tahap penerapan *E-Budgeting*, sedangkan pengembangan Peraturan Walikota atau Juknis tentang *E-Budgeting* merupakan sasaran bagi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019-2021. Modal sosial yang terjalin berupa *Linking* melalui keterlibatan unsur masyarakat, komunitas sektoral dan *stakeholders* lainnya dalam Musrenbang dan Diskusi Kelompok Terbatas.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan koordinasi dan kualitas sumber daya manusia serta mengawal pengembangan Perwali atau Juknis penerapan *E-Budgeting* untuk mendukung keberhasilan implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu, pemeliharaan website transparansi anggaran dan sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran di Pemerintah Kota Surakarta.

Kata kunci: *e-budgeting*, pengelolaan keuangan daerah, evaluasi proses, birokrasi, modal sosial.

**EVALUATION OF E-BUDGETING IN SURAKARTA CITY GOVERNMENT  
(FISCAL YEAR 2018)**

**Wahyuningsih  
wahyuninyugi@gmail.com  
Department of Politics and Government  
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University, Semarang**

**ABSTRACT**

The Surakarta City Government implements E-Budgeting through the application of SIMDA Keuangan. In addition, the Surakarta City Government also implemented a website service for budget transparency. The results in good financial management are indicated by the approval of Wajar Tanpa Pengecualian status from Badan Pemeriksa Keuangan. This study aims to evaluate the implementation of E-Budgeting through the role of the bureaucracy in the Surakarta City Government and the social capital involved in budget allocation decisions making.

The research method used is descriptive qualitative research method with data collection techniques through interviews, observation and literature study. Informants in this study invited seven people from representatives of Bappeda, BPPKAD, Diskomifo SP and Pattiro Surakarta.

The results of this study is the implementation of E-Budgeting using the SIMDA Keuangan as a tool to assist regional financial management has been able to facilitate the stages of budgeting, administration, accounting, reporting and accountability in an integrated and accountable. Budget transparency website services need to be maintained periodically to support transparency. The relationship between the role of the bureaucracy in the implementation of E-Budgeting through the Compliance of the Surakarta City Government involves local financial management regulations. However, there are currently no specific regulations regarding E-Budgeting. The Surakarta City Government is still in the implementation of E-Budgeting, while the development of the Perwali or Juknis on E-Budgeting is a target for the Surakarta City Government Bureaucracy Reform in 2019-2021. Social capital that is intertwined in the form of linking through the involvement of elements of society, sectoral communities and other stakeholders is involved in development planning and budget allocation decisions making.

Suggestion in this research is the need to improve coordination and quality of human resources while overseeing the development of Perwali or Juknis for implementing E-Budgeting to support the successful implementation of E-Budgeting in the Surakarta City Government. In addition, the maintenance of a website for budget transparency and socialization to the public is also needed to increase public involvement in budget oversight in the Surakarta City Government.

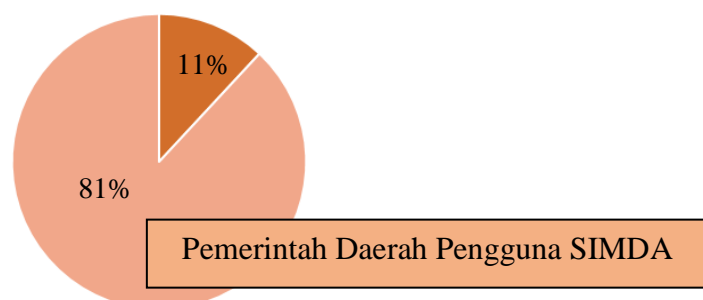
**Keywords:** e-budgeting, regional financial management, evaluation process, bureaucracy, social capital.

## PENDAHULUAN

Penerapan *E-Budgeting* di pemerintah daerah sejalan dengan perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan *E-Budgeting* menjadi sasaran bagi peningkatan kualitas belanja serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Pemerintah pusat turut memberikan dukungan agar pemerintah daerah yang bersangkutan dapat mengelola keuangan daerah secara profesional. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan intern pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan keuangan berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hasil pengembangan sistem tersebut menghasilkan produk berupa program aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan dan sub aplikasi lainnya.

Pengembangan sistem tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 guna mendukung pencapaian indikator kinerja berupa “Meningkatnya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Keberhasilan penerapan SIMDA Keuangan sebagai alat bantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan melalui diagram berikut.

**Diagram**  
**Jumlah Pemerintah Daerah Pengguna SIMDA dengan Opini WTP**  
**Tahun 2015**



Sumber: [bcpk.go.id](http://bcpk.go.id), diolah.

Diagram diatas memberikan informasi mengenai jumlah pemerintah daerah dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan pengguna SIMDA. Pada Tahun 2015, dari total 311 pemerintah daerah peraih WTP sejumlah 254 pemerintah daerah merupakan pengguna aplikasi SIMDA.

Pemerintah Kota Surakarta menjadi salah satu pemerintah daerah yang menerapkan *E-Budgeting* melalui program aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP. Program aplikasi SIMDA Keuangan digunakan sebagai sistem pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surakarta sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara terintegrasi. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta perlu menyiapkan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung lainnya dalam penerapan *E-Budgeting* melalui SIMDA Keuangan. Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan transparansi, Pemerintah Kota Surakarta menerapkan layanan transparansi anggaran melalui beberapa website resmi seperti [e-budget.surakarta.go.id](http://e-budget.surakarta.go.id), [apbd.surakarta.go.id](http://apbd.surakarta.go.id) dan Laporan Keuangan melalui [ppid.surakarta.go.id](http://ppid.surakarta.go.id).

Keberhasilan penerapan *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta ditunjukkan melalui prestasi yang diraih. Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2018. Hal ini menjadikan Pemerintah Kota Surakarta meraih predikat WTP kesembilan kali berturut-turut. Predikat yang diberikan dengan beberapa rekomendasi perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Surakarta guna perbaikan laporan keuangan berikutnya. *E-Budgeting* menjadi salah satu program layanan berbasis online yang masuk dalam agenda *Solo Smart City*. Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi mengenai bagaimana proses implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta.

Penelitian terdahulu mengenai *E-Budgeting* dianalisis berdasarkan indikator komponen dan variabel tertentu serta efektivitas penerapan *E-Budgeting* berdasarkan faktor-faktor pendukung seperti penggunaan komponen, keterbukaan informasi serta kebijakan dan ketegasan pimpinan. Peneliti menemukan *research gap* atau aspek-aspek yang belum diteliti pada penelitian sebelumnya sehingga menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan evaluasi proses implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian ini sama dengan beberapa penelitian sebelumnya dimana tetap menganalisis peran birokrasi. Sedangkan analisis modal sosial merupakan *research gap* sehingga membedakannya dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat pertanyaan mendasar yang dijadikan sebagai perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana evaluasi *E-Budgeting* dalam tahap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surakarta?
2. Bagaimana peran birokrasi dan modal sosial dalam penerapan *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan penelitian secara sistematis, detail, mendalam serta dapat mengungkap makna dari sebuah fakta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penyusunan Program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta, Kepala Sie Data dan Informasi Bidang Penyusunan Program Bappeda Kota Surakarta, Kepala Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Surakarta, Kepala Perencanaan Evaluasi dan Pembangunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta, Superadmin dan Pengelola IT Bidang Anggaran BPPKAD Kota Surakarta, Kepala Sie Aplikasi Bidang Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta dan Perwakilan Tim Advokasi PATTIRO Kota Surakarta. Lokasi penelitian berada di Kota Surakarta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi *E-Budgeting* dalam Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Karianga (2011:63-104) terdapat empat tahapan utama dalam fungsi manajemen pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta diterapkan melalui aplikasi SIMDA Keuangan. Program aplikasi ini memfasilitasi tahap pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi untuk level Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan *output* sebagai berikut:

#### 1. Penganggaran

Tahap penganggaran menghasilkan *output* berupa Rencana Strategis, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perda dan Penjabaran APBD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

#### 2. Penatausahaan

Tahap penatausahaan menghasilkan *output* Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS) beserta register-register dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

#### 3. Akuntansi dan Pelaporan (Pertanggungjawaban)

Tahap akuntansi dan pelaporan sekaligus mencakup pertanggungjawaban menghasilkan Jurnal, Buku Besar, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban serta Penjabarannya dan sebagainya.

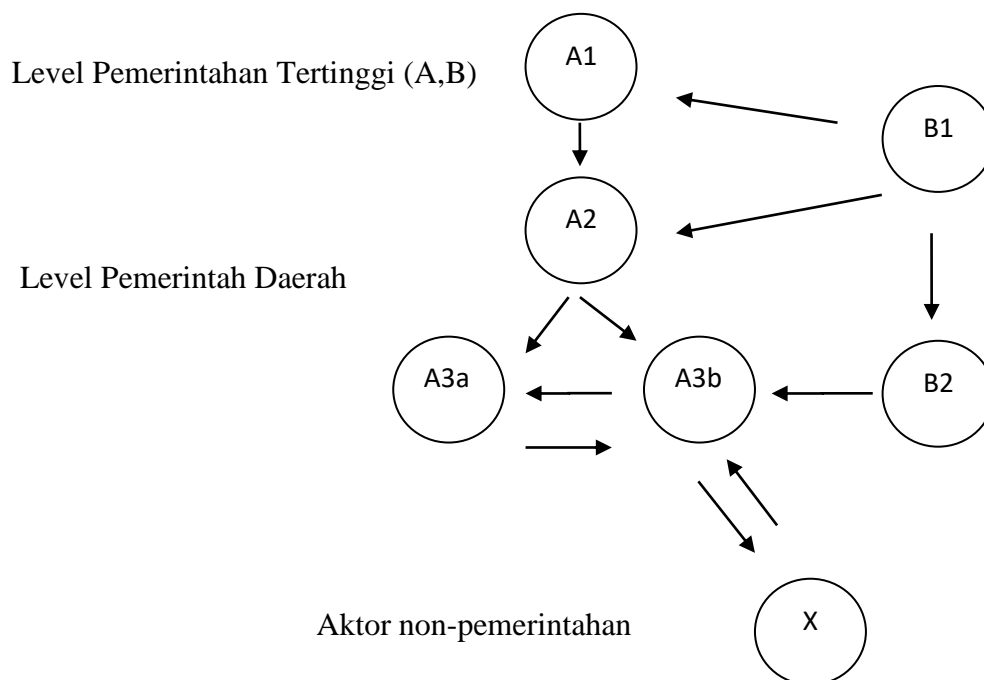
## Peran Birokrasi dalam Penerapan *E-Budgeting*

Menurut Ripley (1985:134-138) terdapat dua fokus utama dalam studi implementasi yaitu *Compliance* dan *What's Happening*. Perspektif *Compliance* memiliki fokus pada aspek kepatuhan dimana agensi-agensi dan orang-orang di dalam agensi tersebut berfungsi dalam batas-batas pengaturan hierarkis. Terdapat *superior* dan *subordinates* dalam hal unit birokrasi. Terdapat dua tipe hubungan kepentingan dalam studi *Compliance* dalam implementasi. Pertama, model hierarki sederhana dari satu agensi (Part A). Asumsinya adalah bahwa keadaan hubungan antara unit atasan dan bawahan merupakan variabel yang paling penting dalam menentukan sifat kegiatan implementasi. Kedua, rangkaian hubungan antar birokrasi yang lebih kompleks yang memberikan ruang bagi berbagai lembaga di beberapa tingkat teritorial dan organisasi non pemerintah untuk melibatkan para aktor dalam implementasi (Part B). Studi *What's Happening* mengasumsikan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat dan mempengaruhi implementasi. Hubungan kepentingan utama dalam perspektif ini meliputi lingkungan, implementasi serta hasil dan kosekuensi program.

Evaluasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta dianalisis dengan tipe kedua (Part B) dalam perspektif *Compliance*. Secara sederhana, hubungan birokrasi dalam analisis ini dapat diilustrasikan melalui gambar berikut.

### Gambar

#### *Relationship of Interest in 2nd Type of Compliance Implementation Studies*



Peran birokrasi dianalisis berdasarkan perspektif *Compliance* dengan hubungan kepentingan Part B sehingga menghasilkan hubungan dalam level hierarki antara lain:

- Level A1 : Pemerintah Pusat dengan berbagai regulasi mengenai perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah hingga keterbukaan informasi.
- Level A2 : Pemerintah Kota Surakarta sebagai instansi pemerintah daerah yang menjalankan aturan pusat, melakukan kerja sama dengan BPKP, mengatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di level daerah serta membagi kewenangan antar instansi.
- Level A3 : Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surakarta yang telah memiliki kewenangan masing-masing setiap instansinya dalam hal perencanaan pembangunan (Bappeda), pengelolaan keuangan daerah (BPPKAD) dan keterbukaan informasi publik serta penyediaan infrastruktur pendukung (Diskominfo SP).

Bappeda Kota Surakarta mengawal perencanaan pembangunan hingga tahap perencanaan anggaran sampai pada KUA-PPAS. Setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah dalam Aplikasi SIMDA Keuangan memfasilitasi pengelolaan anggaran pada level Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini, BPPKAD Kota Surakarta berperan dalam meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah dan kualitas sumber daya manusia Aplikasi SIMDA Keuangan. Hal tersebut ditunjukkan melalui anggaran yang dialokasikan untuk program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Anggaran Penetapan Tahun 2018). Anggaran penetapan Rp. 100.000.000 untuk program penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Rp. 150.000.000 untuk program penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Rp. 943.000.000 untuk program penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rp. 165.000.000 untuk program Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Diskominfo SP Kota Surakarta berperan menyediakan infrastruktur pendukung implementasi *E-Budgeting*. Disisi lain, Pemerintah Kota Surakarta saat ini masih dalam tahap penerapan *E-Budgeting*. Sedangkan pengembangan Perwali/Juknis penerapan *E-Budgeting* menjadi sasaran perubahan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019-2021.

- Level B1 : BPKP RI selaku pengembang aplikasi SIMDA Keuangan.
- Level B2 : Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
- X : Unsur masyarakat, komunitas sektoral dan *stakeholders* lainnya.

## Modal Sosial

Kerekatan hubungan sosial masyarakat dapat membentuk tipologi modal sosial. Stone dan Hughes dalam Catts (2011:45) membedakan konsep ketiganya. Pertama, *Bonding* memiliki karakteristik adanya kedekatan yang tinggi antar anggota komunitas sehingga tercipta suatu kepercayaan dan hubungan timbal balik yang bersifat personal. Kedua, *Bridging* memiliki karakteristik terciptanya kepercayaan yang melibatkan anggota kelompok lain yang berbeda. Terakhir, *Linking* yang melibatkan organisasi dengan kekuatan atau otoritas serta hubungan kepercayaan pada tata kelola pemerintahan. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis hingga tahap apa tipologi modal sosial terjalin. Kaitannya dengan modal sosial diasumsikan bahwa kelompok masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan alokasi anggaran.

Aspirasi masyarakat tidak hanya diakomodir pada aspek kewilayahan melalui Musrenbang, tetapi juga aspek sektoral melalui Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) yang diselenggarakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surakarta. Kehadiran peserta Musrenbang RKPD Kota Surakarta Tahun 2017 mencapai 79, 50%. Sedangkan beberapa contoh realisasi hasil DKT dalam APBD Tahun Anggaran 2018 seperti Komunitas Sololog mengusulkan kegiatan berupa penyelenggaraan seni melalui DKT Dinas Kebudayaan disetujui dan menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000, LKKS Kota Surakarta mengusulkan kegiatan berupa pengadaan alat bantu dengar dan gerak pada penyandang disabilitas melalui DKT Dinas Sosial disetujui dan menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000, Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) mengusulkan kegiatan tes IVA/IMS dan VCT secara reguler melalui DKT Dinas Kesehatan disetujui dan menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.51.000.000 serta masih terdapat contoh lain mengenai keterlibatan berbagai unsur masyarakat, komunitas sektoral dan *stakeholders* lainnya dalam realisasi DKT. Hal ini sesuai dengan Kumar dan Bimal dalam Cropf (2017:105) yang berpendapat bahwa *E-Budgeting* memberikan ruang untuk memberdayakan masyarakat melalui penganggaran partisipatif yang mencerminkan pengambilan keputusan yang demokratis. Selanjutnya, berdasarkan analisis melalui tipologi modal sosial, hubungan sosial masyarakat yang terjalin berupa *Linking*. Pemerintah Kota Surakarta merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki otoritas untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dengan adanya keterlibatan otoritas pemerintah daerah, kepercayaan masing-masing kelompok semakin terjalin sehingga tercipta hubungan kepercayaan pada tata kelola pemerintahan.



## **Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance*. Akuntabilitas mengharuskan lembaga pemerintahan untuk dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan termasuk juga dalam hal ini adalah penganggaran. Akuntabilitas mencakup pihak-pihak yang dilibatkan dalam pencapaian akuntabilitas serta proses dalam akuntabilitas itu sendiri. Robert Behn (2001:62) menawarkan sebuah konsep tentang akuntabilitas demokratis yang didasarkan pada empat pertanyaan antara lain:

1. Siapa yang akan memutuskan hasil apa yang dihasilkan?
2. Siapa yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hasil tersebut?
3. Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses akuntabilitas?
4. Bagaimana cara kerja proses akuntabilitas?

Penerapan *E-Budgeting* menempatkan Pemerintah Kota Surakarta sebagai pihak yang memutuskan serta mempertanggung jawabkan hasil dan proses dalam pencapaian akuntabilitas. Melalui penerapan *E-Budgeting* dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surakarta menghendaki agar setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah hingga pertanggungjawaban dilakukan melalui sistem yang terintegrasi. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan penggunaan anggaran publik sehingga ketepatan penggunaan anggaran dapat tercapai.

Dalam proses perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Surakarta melibatkan berbagai pihak dari pemerintah daerah dan jajarannya, lembaga legislatif daerah, unsur masyarakat, lembaga non pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga lainnya. Selanjutnya, implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta melalui aplikasi SIMDA Keuangan berperan dalam melakukan fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan memfasilitasi setiap tahap penganggaran, penatausahaan, auntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban secara terintegrasi dan akuntabel. Hingga pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Kota Surakarta mempertanggung jawabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 kepada DPRD Kota Surakarta dan BPK. Berdasarkan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Surat 141/S/XVIII/SMG/05/2019 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2018. Opini tersebut diberikan dengan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti guna perbaikan laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surakarta kedepannya. Opini WTP dari BPK merupakan penghargaan ke sembilan kali secara berturut-turut yang diperoleh Pemerintah Kota Surakarta atas laporan keuangan daerahnya sehingga hal ini perlu dipertahankan.

## Layanan Website Transparansi Anggaran

Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan layanan mengenai transparansi penganggaran melalui beberapa website. Pertama, website [e-budget.surakarta.go.id](http://e-budget.surakarta.go.id) memberikan informasi anggaran pada tahap perencanaan anggaran. Mulai dari data Musrenbang, Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), KUA-PPAS, Anggaran Penetapan hingga Pagu Perubahan. Dalam menu Perbandingan KUA/PPAS dan Anggaran Penetapan juga memberikan informasi anggaran setiap OPD hingga detail rencana program kegiatan dan rencana belanja. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta, per Desember 2019 total kunjungan website tersebut mencapai 13.172 kunjungan. Kedua, website [apbd.surakarta.go.id](http://apbd.surakarta.go.id) memberikan akses kepada publik untuk mengetahui informasi anggaran dalam APBD Kota Surakarta seperti Data Alokasi APBD, Anggaran OPD Perurusan hingga Alokasi Anggaran Belanja OPD. Ketiga Laporan Keuangan dalam [ppid.surakarta.go.id](http://ppid.surakarta.go.id) memberikan akses informasi mengenai laporan keuangan. Submenu Laporan Keuangan dalam website [ppid.surakarta.go.id](http://ppid.surakarta.go.id) menjadi akses untuk mendapatkan informasi transparansi anggaran dengan menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Surakarta seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini BPK, Laporan Realisasi Anggaran, Ringkasan DPA SKPD dan PPKD, Perda APBD dan dokumen-dokumen anggaran lainnya. Dokumen-dokumen tersebut dapat diunduh dengan format *file* berupa pdf, word dan excel. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta, intensitas pemohon transparansi anggaran atau keuangan daerah melalui Pejabat Pengelola Data dan Informasi Utama Kota Surakarta pada tahun 2019 sebanyak 4 pemohon.

United Nations Development Programme dalam Adisasmita (2011:24) menyebutkan bahwa transparansi sebagai salah satu prinsip *good governance* dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Dalam *E-Budgeting*, membuat anggaran sepenuhnya dapat diakses publik merupakan hal yang penting. Pelaksanaan layanan transparansi penganggaran sejalan dengan penelitian Greitens dan Strachen dalam Cropf (2017:105) yang menyatakan perlunya situs web pemerintahan tentang informasi anggaran. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta menjadi instansi pemerintahan daerah yang menunjukkan komitmen untuk mewujudkan transparansi penganggaran melalui layanan website transparansi anggaran seperti [e-budget.surakarta.go.id](http://e-budget.surakarta.go.id), [apbd.surakarta.go.id](http://apbd.surakarta.go.id) dan Laporan Keuangan dalam [ppid.surakarta.go.id](http://ppid.surakarta.go.id).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta didukung melalui penerapan aplikasi SIMDA Keuangan yang telah mampu memfasilitasi manajemen pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban secara terintegrasi. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta juga menerapkan beberapa layanan website transparansi anggaran melalui [e-budget.surakarta.go.id](http://e-budget.surakarta.go.id), [apbd.surakarta.go.id](http://apbd.surakarta.go.id) dan Laporan Keuangan dalam [ppid.surakarta.go.id](http://ppid.surakarta.go.id).

Analisis hubungan birokrasi terkait dengan evaluasi proses dalam implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta dikaji berdasarkan tipe kedua dalam perspektif *Compliance*. Setiap level dalam perspektif *Compliance* menjelaskan adanya hubungan birokrasi dalam batasan peraturan hierarkis dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah. Keseluruhan unit pada masing-masing level menjalin koordinasi yang baik dalam proses *E-Budgeting*. Analisis hubungan sosial yang terbangun dalam kelompok masyarakat masuk dalam kategori tipologi modal sosial *Linking*. Pemerintah Kota Surakarta memiliki otoritas untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, komunitas sektoral dan *stakeholders* lainnya dalam Musrenbang dan Diskusi Kelompok Terbatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proses yang berlangsung mampu mendukung pencapaian akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kota Surakarta sekaligus sebagai upaya mewujudkan *good governance*.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang ingin disampaikan guna keberlanjutan implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surakarta.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia birokrasi agar mengimbangi pembaharuan sistem *E-Budgeting* kedepannya.
3. Mengawal pengembangan Peraturan Walikota atau Petunjuk Teknis tentang penerapan *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta.
4. Melakukan pemeliharaan website transparansi anggaran.
5. Melakukan sosialisasi mengenai layanan transparansi penganggaran untuk meningkatkan pengawasan pembangunan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Behn, Robert D. 2001. *Rethinking Democratic Accountability*. Washington DC: Brookings Institution Press
- Catts, Ralph, et.al. 2011. *Vocational Learning: Innovative Theory and Practice*. London: Springer.
- Creswell, John. W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cropf. Robert. A. 2017. *E-Governmnet for Public Managers: Administering the Virtual Public Sphere*. London: Rowman and Littlefield.
- Karianga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Bandung: Alumnus.
- Ripley, Randall B.. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publisher.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26-A Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019-2021.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2017. “Bersinergi Melalui Aplikasi SIMDA Dukung Capaian WTP”, <http://www.bpkp.go.id/berita/read/17657/0/Bersinergi-Melalui-Aplikasi-SIMDA-Dukung-Capaian-Opini-WTP.bpkp>, diakses pada 7 Maret 2020 pukul 09.35.
- apbd.surakarta.go,id
- bpkp.go.id
- e-budget.surakarta.go,id
- ppid.surakarta.go.id